

PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MELALUI BUMDES DI DESA SIRNOBOYO

Agoes Hendriyanto dan Afid Burhanuddin

STKIP PGRI Pacitan, Jalan Cut Nya' Dien No. 4A Ploso Pacitan

E-mail: rafid.musyffa@gmail.com, e-mail: afidburhanuddin@gmail.com

Abstract: *Increasing the capacity of human resources was, in fact, to be the key to the successful implementation of the Village-Owned Enterprises (BUMDes) Sirnobojo. However, it was not merely that simple to do. It was caused by the variety of problems which often occurred in the field. The results of this activity showed that (1) the start-up of BUMDes in Sirnobojo should be immediately enhanced; (2) the issue of the BUMDes in Sirnobojo were in the institutional management, the indiscipline of the staff, and the low executor initiatives.*

Keywords: *BUMDes, empowerment and Sirnobojo village.*

Abstrak: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada hakikatnya menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan Badan Milik Usaha Desa (BUMDes) Sirnobojo. Hanya saja, hal itu tidak mudah dilakukan karena beragam persoalan acapkali terjadi di lapangan. Hasil pemberdayaan masyarakat di Desa Sirnobojo menemukan, (1) rintisan pembentukan BUMDes di Desa Sirnobojo hendaknya dapat segera diretas; (2) persoalan pembentukan BUMDes di Desa Sirnobojo, di antaranya, dibidang penataan kelembagaan, ketidakdisiplinan pelaksana tugas, dan rendahnya inisiatif pelaksana.

Kata Kunci: BUMDes, pemberdayaan dan Desa Sirnobojo.

PENDAHULUAN

Tahun 2016 merupakan tahun yang penuh dengan perjuangan baik bagi pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Ketidakberdayaan masyarakat menyebabkan semakin tingginya angka kemiskinan menjadi fenomena yang sangat menarik dari dulu sampai kini. Ketidakberdayaan masyarakat jika kita berkata jujur akan selalu menjadi isu politik bagi calon yang ingin maju menjadi kepala daerah, legislatif, maupun menjadi presiden. Sunyono (2012:

1) ketidakberdayaan atau kemiskinan dewasa ini menjadi permasalahan yang besar, jika tiap akhir tahun menyisakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Fenomena gunung es akan menjadi kenyataan jika tidak segera diatasi persoalan pokoknya.

Pemerintah sebetulnya telah sejak dulu mengeluarkan undang-undang dan peraturan pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa. Badan usaha tersebut meliputi semua

kegiatan ekonomi masyarakat yang dihimpun menjadi badan milik desa yang investornya dari desa, dikelola oleh warga desa, untuk hajat hidup warga desa, dan keuntungannya untuk warga desa. Pada hakikatnya BUMDes mempunyai tujuan yang mulia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat dengan BUMDes diproyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah perdesaan. Sebagaimana tertuang dalam UU No 6 tahun 2014 tentang Desa yang memberikan payung hukum atas BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. Namun kenyataannya masih banyak desa yang belum mempunyai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Payung hukumnya sudah sangat jelas dan dapat digunakan sebagai pijakan pemerintah desa untuk membuat BUMDes.

Istilah BUMDes telah muncul melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 72/2005 dan dirincikan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 39/2010. BUMDes merupakan wadah usaha desa yang memiliki semangat kemandirian, kebersamaan, dan kegotong-royongan antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mengembangkan aset-aset lokal untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa.

Namun demikian belum begitu banyak desa di Indonesia, berdasarkan data desa di Indonesia dengan jumlah 79.075 desa dengan total anggaran 50 triliun (wikepedia, diakses tanggal 23 Desember 2016). Potensi yang sangat luar biasa jika keseluruhannya membentuk BUMdes maka kesejahteraan rakyat akan terwujud. Koran sindo tanggal 16 Juni 2016 jumlah BUMDes, terjadi kenaikan

yang signifikan dari target 5000 unit melesat menjadi 12.115 unit. Menteri Kemendes Marwan peningkatan yang luar biasa tersebut jangan hanya sekedar jumlahnya namun akan kementrian desa akan memfokuskan pada peningkatan kualitas BUMDes.

GAMBARAN OBJEK SASARAN

Desa Sirnobojo terletak di Kecamatan Pacitan. Luas wilayah Desa Sirnobojo 163,195 ha. Batas-batas wilayah Desa Sirnobojo adalah sebagai berikut : 1) sebelah utara Desa Arjowinangun (Kecamatan Pacitan); 2) sebelah selatan, Desa Sirnobojo (Kecamatan Pacitan); 3) sebelah timur Desa Kayen dan Sukoharjo (Kecamatan Pacitan); 4) sebelah barat Desa Baleharjo dan Arjowinangun (Kecamatan Pacitan).

Iklim di Desa Sirnobojo meliputi, curah hujan 2,478 mm dengan jumlah bulan hujan 4 suhu rata-rata harian 28 0 – 32 0 C, tinggi tempat dari permukaan laut 4 - 5 mdpl. Jenis dan kesuburan tanah warna tanah sebagian besar abu-abu, dengan tektur tanah pasir/debu. Tingkat erosi tanah, luas tanah erosi ringan 3,000 ha dan luas tanah yang tidak ada erosi 160,195 ha.

Jumlah penduduk Desa Sirnobojo 4.303 orang, terdiri dari jumlah laki-laki 2.193 orang dan jumlah perempuan 2.110 orang dengan jumlah kepala keluarga 1.208 KK.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan Bumdes Sirnobojo

BUMDesa Sirnobojo tahun 2017 harus segera terbentuk untuk itu langkah yang telah dilakukan pemerintah desa Sirnobojo untuk tahun anggaran 2017 sebagai berikut. Pertama peningkatan pendapatan aparatur pemerintahan desa Sirnobojo untuk meningkatkan kinerja. Hal ini tertuang

dalam rancangan RAPBDes Sirnobojo tahun 2017 terjadi peningkatan tunjangan tanpa melanggar rambu-rambu dari pusat yang tidak melebihi batas 30 % dari bantuan dari Alokasi Dana Desa Kabupaten Pacitan sebesar 700 juta.

Melakukan penganggaran dalam rangka pembentukan BUMDes mulai dari akta notaris sampai biaya rapat. Selain itu, anggaran untuk segera membuat satu unit kerja dalam bidang ekonomi dengan membuat supermarket Desa Sirnobojo sebagai pioner bagi UMDesa "Mitra Abadi". Untuk itu rencana APBDesa yang ditujukan untuk fisik untuk tahun 2017 yang sekiranya tidak mendesak perlu adanya pengurangan anggaran untuk dialihkan ke BUMDes.

Tahun 2017 sebagai kami pilih sebagai momentum pendirian BUMDesa disebabkan Desa Sirnobojo sekarang mempunyai ikon jembatan yang sangat cantik yang menghabiskan dana 73 milyar yang perlu segera dijadikan primadona desa Sirnobojo sebagai pusat kuliner dan wisata. Jembatan tersebut harus segera dijadikan semangat untuk merealisasikan seluruh agenda pendirian BUMDesa Sirnobojo.

Selain itu desa Sirnobojo menjadi *rest area* bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke pantai Soge maupun Pidakan. Oleh karena itu rest area dan kuliner perlu segera dibangun. Untuk peraturan desanya sudah kami selesaikan tinggal menunggu dari koreksi dari pemerintah Desa Sirnobojo.

Persoalan Badan Usaha Milik Desa Sirnobojo

Pemetaan permasalahan yang menjadi kendala yang perlu disikapi antara pemerintah desa, lembaga desa Sirnobojo, dan masyarakat. Kelemahan yang perlu segera kita benahi

untuk melakukan pendirian BUMDes di Desa Sirnobojo adalah sebagai berikut:

Pertama, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut: (1) penataan kelembagaan desa belum berjalan secara maksimal sehingga BUMDes pun belum dilembagakan dalam format pemerintahan dan perekonomian desa; (2) keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di desa untuk mengelola dan mengembangkan BUMDes yang akuntabel dan berkinerja baik; (3) rendahnya inisiatif lokal untuk menggerakkan potensi ekonomi lokal bagi peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi warga desa; (4) belum berkembangnya proses konsolidasi dan kerjasama antar pihak terkait untuk mewujudkan BUMDes sebagai patron ekonomi yang berperan memajukan ekonomi kerakyatan di desa Sirnobojo; serta (5) kurangnya responsivitas Pemda untuk menjadikan BUMDes sebagai program unggulan untuk memberdayakan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, ketidakdisiplinan dalam menjalankan tugas akhirnya menjadi kecemburuan bagi perangkat teknis lainnya disebabkan haknya sebagai perangkat teknis sama dengan mereka yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Disini penghargaan terhadap kinerja hanya didasarkan darikedudukannya tanpa memperhatikan kinerjanya. Hal ini akan mengganggu jalannya pembentukan BUMDesa Sirnobojo. Jika, dibandingkan dengan Desa Ponggok Kabupaten Klaten terlihat perbedaan yang mencolok dimana di desa tersebut kepala urusannya hanya 3 orang dengan 1 sekretaris desa dengan profesioanlismenya mampu untuk menjalankan pemerintahan desa dengan berbasis Teknologi informasi. Setiap sebulan sekali selalu didatangkan motivator agar kerja otak kanan dan kiri berjalan seimbang. Namun demikian masih

perlu waktu untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah Desa Sirnobojo dengan menyediakan anggaran di APBDes Sirnobojo tahun 2017 pelatihan perangkat desa.

Sebenarnya dengan melakukan pelatihan dan magang satu bulan untuk pengelola BUMDes Sirnobojo di BUMDes Ponggok akan terjari tranfer ilmu yang berguna bagi pengembangan BUMDes Sirnobojo ke depannya. Dengan demikian kendala pertama dan kedua sebenarnya dapat diatasi dengan melakukan pembinaan bagi kader muda yang berbakat bagi pengembangan BUMDes Sirnobojo ke depan. Pada hakikatnya terjadi peningkatan jumlah lulusan sarjana di Desa Sirnobojo sebagai aset yang harus dimanfaatkan bagi kemajuan desa Sirnobojo. Generasi muda sebagai aset perlu adaya peningkatan anggaran dalam APBDes Sirnobojo.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan bagian dari usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil yang merupakan program yang harus menjadi fokus dalam pengabdian program Menurut (Basrowi, 2011) kendala atau masalah yang paling banyak dirasakan oleh pengusaha mikro adalah tentang sulitnya para pengusaha mikro tersebut dalam memperoleh pinjaman untuk tambahan modal, karena banyak usaha mikro banyak yang tidak memenuhi perssyarat administrasi yang diberlakukan oleh pihak perbankan baik swasta maupun pemerintah. Sebenarnya jika BUMdes yang direncanakan mempunyai kredibilitas kepengurusannya kita bisa menjalin kerja sama dengan pihak ketiga atau masyarakat Desa Sirnobojo yang mempunyai modal. Sehingga kita tidak perlu lagi untuk meminjam di perbankan.

Ketiga, rendahnya inisiatif lokal untuk menggerakkan potensi ekonomi lokal bagi

peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi warga desa. Masyarakat masih terbiasa untuk kerja individu daripada kerja kelompok. Untuk itu perlu adanya peningkatan partisipasi warga bagi peningkatan kesejahteraan desa Sirnobojo. Berdasarkan hasil rapat antara kepala Desa Sirnobojo, Ketua BPD, Lembaga Desa mempunyai gagasan yang sama dengan melakukan lomba simulasi untuk meningkatkan kerja sama antar anggota masyarakat Desa Sirnobojo. Untuk itu perlu adanya anggaran untuk pelaksanaan simulasi yang harus tercantum dalam APBDes Sirnobojo tahun 2017.

Sekaligus lomba simulasi ini untuk meningkatkan proses konsolidasi dan kerjasama antar pihak terkait untuk mewujudkan BUMDes sebagai patron ekonomi yang berperan memajukan ekonomi kerakyatan di desa Sirnobojo. Inisiatif dari Pemerintah Kabupaten Pacitan masih sangat kurang sekali terhadap kemajuan BUMDes di Kabupaten Pacitan. Untuk itu maka perlu adanya inisiatif dari desa Sirnobojo sendiri dengan melakukan kerja sama magang dengan desa Ponggok Kabupaten Klaten yang dianggarkan dalam APBDes Sirnobojo tahun 2017.

Kearifan berpikir antara pemerintahan Desa Sirnobojo, Badan Permusyawaratan Desa Sirnobojo, lembaga desa, dan masyarakat menjadi modal berarti bagi terbentuknya BUMDes Sirnobojo “Mitra Abadi” tahun 2017. Berdasarkan kondisi global yang sangat tidak menentu diperlukan kerjasama masyarakat dengan jiwa kebersamaan dan gotong royong dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Sirnobojo agar bisa meniru Desa Poggok menjai desa mandiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penataan kelembagaan desa belum berjalan secara maksimal sehingga BUMDes di Desa Sirnobojo perlu dilembagakan dalam format pemerintahan dan perekonomian desa. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia untuk mengelola dan mengembangkan BUMDes hendaknya akuntabel dan berkinerja baik.

Saran

Pembentukan BUMDes Sirnobojo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan tidak mudah memerlukan keuletan, kesabaran, keberanian, kejujuran, dan keiklasan tidak mudah perlu waktu yang lama. BUMDesa Ponggok Kabupaten Klaten dimulai dari tahun berdiri 2009 setelah 6 tahun baru menghasilkan pendapatan kotor yang fantastik. Hambatan dan tantangan bagi pembentukan BUMDes Sirnobojo membutuhkan kader terutama direktur atau ketua BUMDes orang-orang yang handal dan profesional di bidangnya. Pengalokasian anggaran untuk tahun 2017 membutuhkan kerja keras bagi terbentuknya BUMDes “Mitra Mandiri” menjadi penyumbang pendapatan asli desa yang bisa diandalkan untuk kesejahteraan masyarakat Desa Sirnobojo.

DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi. 2011. Pemberdayaan Masyarakat Tertinggal. *Laporan Hasil Penelitian*. Lampung: Unila.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
- Peraturan Desa Ponggok., Nomor 06, Tahun 2009, Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Soenyono. 2012. *Sosiologi Pemberdayaan Masyarakat: Community Empowerment*. Surabaya: Jenggala Pustaka Utama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa